



Pemkot Yogya Komitmen Penguatan Transparansi Keuangan Daerah

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya menunjukkan komitmennya dalam penguatan transparansi keuangan daerah. Langkah ini ditunjukkan melalui penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Yogya Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tepat waktu.

Penyerahan dilakukan langsung oleh Walikota Yogya Hasbi Wardoyo, dan diterima oleh Kepala BPK RI Perwakilan DIY, Agusnita Sugihartatik, di Kantor BPK RI Perwakilan DIY, Selasa sore (3/2). Hasbi Wardoyo, menegaskan pentingnya pengungkapan keuangan daerah, sekaligus bentuk komitmen Pemkot Yogya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Menurutnya, LKPD Tahun Anggaran 2025 yang diserahkan terdiri dari tujuh laporan utama. Ketujuh laporan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan LKPD dilakukan secara cermat dan teliti melalui tahapan penting berupa proses review oleh Inspektori Kota Yogya. Proses review tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh data dan informasi yang disajikan telah sesuai dengan standar dan kriteria akuntansi pemerintahan yang berlaku. LKPD ini sudah melalui proses review dari Inspektori Kota Yogya. Tujuannya untuk memastikan bahwa data yang disajikan benar, akurat, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku sebelum diserahkan kepada BPK. Hasil review tersebut juga telah kami sertakan dalam dokumen LKPD," ujarnya.

Selain tujuh laporan utama, Pemkot Yogya juga melampirkan sejumlah dokumen pendukung sebagai bagian dari kelengkapan administrasi. Dokumen tersebut antara lain berupa Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani langsung oleh Kepala Daerah, Laporan Kinerja Capaian Kinerja Pembangunan Kota Yogya, serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ia berharap proses pemeriksaan yang dilakukan BPK dapat berjalan lancar, sehingga hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi pemerintah daerah ke depan.

cara resmi, pahalanya telah menerima konsep LKPD dari Pemkot Yogya beberapa hari sebelumnya. Konsep tersebut digunakan untuk melakukan review awal, terutama terkait kelengkapan dokumen serta hasil review dari Inspektori Kota Yogya beserta tindak lanjutnya. "Beberapa hari sebelum penyerahan resmi hari ini, kami sudah menerima konsep LKPD untuk dilakukan review awal. Pertama terkait kelengkapan dokumen, dan kedua berkaitan dengan hasil review Inspektori Kota Yogya beserta tindak lanjut atas review tersebut. Alhamdulillah, semuanya sudah memenuhi baik dari sisi kelengkapan maupun tidak lanjut hasil review," ungkapnya.

Agustin juga mengapresiasi konsistensi Pemkot Yogya dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dirinya menyebutkan Pemkot Yogya telah berhasil meraih ompr Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 16 kali dari BPK. "Ini merupakan prestasi yang sangat baik dan harus terus dipertahankan. Semoga dengan prestasi ini, Pemkot Yogya dapat semakin meningkatkan kinerjanya, terutama dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat," ujarnya.



(Dhi-f) Penyerahan LKPD Kota Yogya Tahun Anggaran 2025 kepada BPK RI Perwakilan DIY.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005